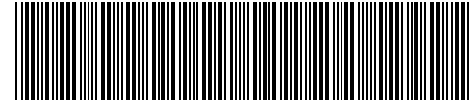




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400529/2026**



DS:2300-4905-4913-3410

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 03

Tanggal : 06 April 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
- Sebesar : Rp. 345.380.000 (TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 345.380.000
Rp. 345.380.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	214.112.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	131.268.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 345.380.000

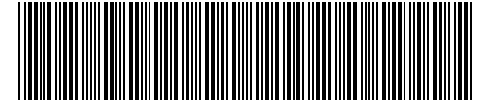
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



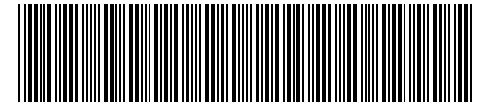
DS:2300-4905-4913-3410

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Halaman : I A. 1

Program	: 005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	345.380.000
Kegiatan	: 1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	345.380.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
	: 2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	: 3. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	
	: 4. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	
	: 5. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	
	: 6. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	
	: 7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
	: 8. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	: 9. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	
	: 10. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
	: 11. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 12. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 13. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 14. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
	: 15. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	
	: 16. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
	: 17. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
	: 18. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
	: 19. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
	: 20. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2300-4905-4913-3410

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Halaman : I A. 2

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- 21. 14 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
- 22. 15 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court

Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	11,00	kegiatan	206.180.000	
Rincian Output	:	01	AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	9,00	kegiatan	57.480.000
		02	AEA.003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1,00	kegiatan	17.432.000
		03	AEA.004	Koordinasi Pembinaan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	131.268.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	310,00	Perkara, Berkas Perkara	139.200.000	
Rincian Output	:	01	BCA.U06	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	290,00	Perkara	126.400.000
		02	BCA.U07	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah	20,00	Perkara	12.800.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2026

I B. SUMBER DANA



DS:2300-4905-4913-3410

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 Kode>Nama Satker : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	345.380.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	214.112.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2300-4905-4913-3410

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
Kewenangan : (KD)

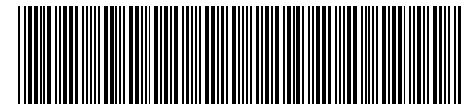
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	-	345.380	-	-	-	345.380		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	345.380	-	-	-	345.380		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	345.380	-	-	-	345.380		
1049.AEA	Koordinasi (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	206.180	-	-	-	206.180	16 . 51	
01	RM	-	74.912	-	-	-	74.912	046	
04	PNBP	-	131.268	-	-	-	131.268	046@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	139.200	-	-	-	139.200	16 . 51	
01	RM	-	139.200	-	-	-	139.200	046	
JUMLAH		-	345.380	-	-	-	345.380		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2300-4905-4913-3410

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (400529) PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

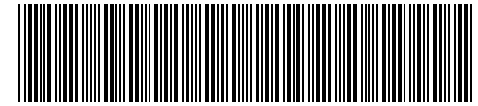
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	10.062	43.894	10.062	67.542	10.062	10.062	10.062	141.330	10.062	10.062	11.062	11.118	345.380
		BELANJA BARANG	10.062	43.894	10.062	67.542	10.062	10.062	10.062	141.330	10.062	10.062	11.062	11.118	345.380
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	10.062	43.894	10.062	67.542	10.062	10.062	10.062	141.330	10.062	10.062	11.062	11.118	345.380
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	10.062	43.894	10.062	67.542	10.062	10.062	10.062	141.330	10.062	10.062	11.062	11.118	345.380
		PERKIRAAN PENERIMAAN	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4.000
		- PNBP (425239)	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2026
IV A. B L O K I R**



DS:2300-4905-4913-3410

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [400529] PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

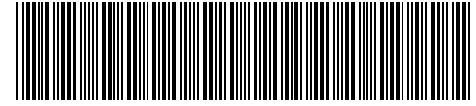
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	62.180
	52 Belanja Barang	Rp.	62.180
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1049.AEA	Koordinasi		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	800
	Kebijakan Pemerintah		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	61.380
	Kebijakan Pemerintah		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400529/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:2300-4905-4913-3410

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [400529] PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

tt.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002